

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

APBD Perubahan 2020 Harus Segera Dibahas

► Meski di Tengah Masa Pandemi

Gambir, Warta Kota

Pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 dan APBD 2021 harus segera dibahas. Soalnya itu tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta kepada masyarakat Ibu Kota Demikian diungkap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial.

"Meski dalam kondisi darurat, itu harus segera dibahas dan dibuatkan Perda (Peraturan Daerah), karena dalam aturan Undang-Undang memang seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibahas," ujar Syahrial, Rabu (12/8).

Syahrial memprediksi, pembahasan mengenai APBD Perubahan 2020 tidak akan membutuhkan waktu panjang. Sebab APBD DKI senilai Rp 87,9 triliun diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Karena itu, bila tidak dapat digelar secara tatap muka. Pembahasan mengenai anggaran dapat dilaksanakan dengan cara virtual melalui aplikasi Zoom.

Selain itu, keputusan mengenai rancangan Perda tentang APBD Perubahan harus diambil oleh DPRD DKI Jakarta bersama kepala



Syahrial

daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran tersebut berakhir. Artinya satu bulan lagi atau September 2020. Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta harus menerbitkan Perda soal APBD Perubahan.

Hal ini sebagaimana Pasal 317 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Kalau memang pakai aplikasi Zoom, bagi saya itu bukan persoalan yang sulit karena kami juga sudah terbiasa memakai teknologi tersebut," ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Hal itu dikatakan Syahrial untuk menepis adanya polemik mengenai pembahasan APBD melalui virtual, bukan tatap muka. Beberapa anggo-



Kalau memang pakai aplikasi Zoom, bagi saya itu bukan persoalan yang sulit karena kami juga sudah terbiasa memakai teknologi tersebut.

Syahrial
Anggota Komisi C DPRD
DKI Jakarta Syahrial

ta dewan ada yang menilai, pembahasan APBD Perubahan yang digelar secara virtual tidak akan berjalan dengan maksimal.

"Aplikasi zoom sudah pernah dilakukan saat rapat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tengah Covid-19, jadi menurut saya itu hal biasa," ungkapnya. (faf)